

BAB II

GERAKAN FEMEN DI UKRAINA

Bab ini menguraikan dinamika awal berdirinya Gerakan Femen, mulai dari konteks sosial yang melatarbelakanginya hingga transformasinya dari gerakan domestik menjadi aktor advokasi transnasional. Penjelasan ini penting untuk memahami bagaimana Femen membangun identitas politiknya, strategi gerakannya, serta bagaimana ide-ide mereka berkembang dan menyebar dari Kyiv hingga ke panggung internasional.

2.1. Dinamika Gerakan Femen

Gerakan Femen didirikan pada tahun 2008 di Kyiv oleh Anna Hutsol bersama beberapa aktivis perempuan lainnya sebagai bentuk respons terhadap meningkatnya ketidaksetaraan gender di Ukraina. Gerakan ini lahir dari keprihatinan terhadap eksploitasi seksual dan perdagangan perempuan, di mana Ukraina menjadi salah satu negara sumber utama dalam perdagangan manusia di Eropa. Selain itu, Femen menentang dominasi patriarki post-Soviet yang masih kuat, yang menempatkan perempuan dalam peran domestik tradisional serta menghambat partisipasi mereka dalam bidang politik dan ekonomi. Kurangnya keterwakilan perempuan dalam pemerintahan, terutama dalam proses pembuatan kebijakan yang berdampak langsung pada hak-hak mereka, menjadi perhatian utama gerakan ini. Kemudian, perjuangan awal mereka difokuskan pada hak-hak perempuan Ukraina, dimana dalam perkembangannya mereka memindahkan basisnya ke Paris dan berekspansi ke lingkup yang lebih global (Biswas, 2015).

Pemimpin Femen, Anna Hutsol, seperti banyak anggota Femen lainnya, berasal dari kelas menengah Ukraina dan menggunakan bahasa Rusia serta Ukraina secara bergantian. Pada tahun 2009, Anna Hutsol mengatakan kepada media bahwa suatu hari ia akan mencalonkan diri untuk jabatan politik dan berencana mendirikan “partai perempuan terbesar di Eropa.” (Femen Livejournal 2011). Femen yang awalnya berada pada tingkat domestik Ukraina, pada perkembangannya telah menjadi pergerakan yang berada pada level internasional. Hal ini dibuktikan dengan aktivitas pergerakan yang dilakukan oleh aktivis Femen yang terjadi di Negara-negara Eropa lain seperti Perancis, Swedia, dan Italia.

Gerakan Femen beberapa tahun terakhir menjadi pembicaraan yang cukup kontroversial di dunia, khususnya di Eropa, mengingat bahwa tindakan yang dilakukan bersifat cukup berani dan frontal. Perdebatan mengenai metode Gerakan Femen juga telah menciptakan ketertarikan media terhadap kelompok ini, yang layak mendapat perhatian akademis lebih lanjut sebagai bagian dari wacana publik tentang gender dan globalisasi. Blog Femen sendiri telah menjadi arsip representasi media massa terhadap merek feminisme mereka, di mana para pengamat dan kritikus dapat menelusuri berbagai sistem simbolik yang memiliki makna penting secara nasional.

Gerakan Femen mulai mendapat perhatian internasional ketika dipimpin oleh Inna Shevchenko pada tahun 2013 hingga saat ini. Pada saat itu, protes-protes Femen cukup menarik perhatian dunia hingga mengharuskan organisasi ini mencari suaka ke Perancis untuk menghindari permasalahan penangkapan di Ukraina. saat ini, Femen memiliki markas resmi di Perancis dan

Jerman, serta facebook-based group dari berbagai negara di dunia (Ukraina, Kanada, Amerika Serikat, Turki, Mesir, Polandia, Italia, India, Kurdistan, Rusia, Belarus, Belanda, Brazil, Tunisia, Jerman dan Perancis) (Femen, 2014).

Gerakan Femen mengalami transformasi signifikan dari organisasi feminis radikal berbasis Ukraina menjadi aktor protes transnasional dengan pusat operasi utama di Eropa Barat, khususnya di Prancis dan Jerman. Pemindahan markas mereka ke Paris pada tahun 2012 menandai titik balik strategis yang memungkinkan Femen memanfaatkan tradisi sekularisme dan kebebasan berekspresi di Prancis sebagai lahan subur bagi protes visual mereka. Melalui aksi topless yang dilakukan di situs-situs simbolik seperti gereja, parlemen, dan kedutaan besar, mereka secara efektif menjadikan tubuh perempuan sebagai alat komunikasi politik lintas negara. Aksi ini menarik perhatian media Eropa, membentuk narasi simbolik global tentang penolakan terhadap patriarki, agama institusional, dan represi negara terhadap hak perempuan.

Di Eropa, keberhasilan Femen terletak pada kemampuannya membentuk jaringan aksi lintas negara yang menyatukan ideologi feminisme radikal dengan strategi media visual yang provokatif. Mereka mendirikan cabang di Prancis, Jerman, Spanyol, dan Tunisia, serta menjalin solidaritas isu global seperti pelarangan jilbab, kekerasan seksual, dan dominasi agama. Namun, ekspansi ini juga menimbulkan kritik karena pendekatan universalistik mereka dinilai mengabaikan konteks kultural lokal, terutama di negara-negara dengan komunitas Muslim besar (Ahmed, 2011). Beberapa kelompok feminis menuduh Femen mereproduksi narasi penyelamatan ala kolonialisme feminis Barat yang

mengesampingkan suara perempuan non-Barat. Meski demikian, Femen tetap menjadi salah satu contoh paling nyata dari feminisme visual yang mampu melintasi batas negara dan mempertemukan aktivisme tubuh dengan jangkauan digital global.

Meski menghadapi resistensi internal dalam komunitas feminis Eropa, Femen berhasil mengukuhkan diri sebagai simbol gerakan feminisme tubuh di era digital. Mereka membangun "brand protes global" yang kuat tercermin melalui ikonografi mahkota bunga, tulisan tubuh, dan strategi flash mob yang dapat dikenali dan direplikasi secara cepat di berbagai negara. Dalam konteks ini, kekuatan utama Femen terletak bukan pada kapasitas organisasional formal, melainkan pada kemampuannya mengkapitalisasi media dan membentuk diskursus visual global (Johnston & Taylor, 2008). Gerakan ini menunjukkan bahwa keberhasilan transnasional tidak hanya ditentukan oleh besarnya dukungan akar rumput, tetapi juga oleh kemahiran dalam mengendalikan simbol, narasi, dan ruang visibilitas global.

Masalah politik gender di Ukraina menjadi salah satu alasan munculnya gerakan perempuan radikal seperti Gerakan Femen, yang kemudian mengerucut menjadi kritik terhadap masalah politik seksual yang digunakan Femen melalui aksi topless. Politik seksual menurut Millett diartikan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan diskriminasi gender yang berakar dari identitas seksual (perbedaan pada tubuh perempuan dan laki-laki). Gerakan Femen merupakan hasil relasi kuasa yang selama ini didominasi oleh kepentingan-kepentingan Ukraina sebagai negara (*the dominators*). Sedangkan Femen sebagai warga negara

hanya menerima apa yang telah diatur oleh negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Secara konsep demokrasi, hal itu tidak dibenarkan karena warga negara juga memiliki hak dalam pembentukan regulasi yang berlaku di negara mereka. Oleh karena itu, kemunculan Femen dianggap sebagai respon atas keprihatinan perempuan-perempuan Ukraina saat ini yang masih kurang terwakilkan hak-hak suara mereka, termasuk dalam parlemen Ukraina.

Permasalahan-permasalahan perempuan yang terjadi di Ukraina sangat mempengaruhi munculnya gerakan-gerakan perempuan radikal seperti Gerakan Femen. Gerakan Femen memang bukan satu-satunya gerakan perempuan yang baru muncul di Ukraina, namun kekuatan Gerakan Femen mampu membawanya menjadi gerakan perempuan yang paling banyak menarik perhatian masyarakat, baik di Ukraina maupun di negara-negara lain (Mariya Majerchyk & Olha Plakhotnik 2013). Kekuatan Femen merupakan hasil dari relasi kuasa dimana Ukraina sebagai negara menguasai penuh dominasi kekuatan negara, sedangkan perempuan sebagai bagian dari masyarakat sipil hanya menjadi korban atas dominasi kekuasaan tersebut. Relasi kuasa yang dibentuk oleh Femen merupakan penggambaran dari latar belakang sejarah penindasan-penindasan yang terjadi terhadap perempuan-perempuan Ukraina dan kesadaran perempuan-perempuan Ukraina untuk secepatnya bangkit memperjuangkan hak-hak perempuan. Bila kekuatan Ukraina sebagai negara terletak pada hak dalam melegitimasi peraturan-peraturan hukum yang berlaku di masyarakat, masyarakat sipil memiliki kekuatan di sisi pergerakan sosial, dalam hal ini pergerakan perempuan.

Para akademisi feminis transnasional telah memperdebatkan peran representasi dalam memediasi dialog tentang hak-hak gender. Yang sangat penting adalah kajian kritis terhadap kebijakan neoliberal dan penguatan kembali perbedaan antara Timur dan Barat dalam konteks pasca-komunis (Gal & Kligman 2000). Perbedaan ini penting untuk melihat bagaimana Femen mendapatkan perhatian media. Sikap politik ambigu kelompok ini "melawan segala bentuk kediktatoran dan agama," memberikan mereka strategi retorika yang ada sejak awal pembentukan mereka untuk mengaitkan citra mereka dengan berita-berita tentang penyebab yang tidak langsung terkait dengan feminisme dan hak-hak perempuan (Femen 2009). Metode aksi mereka yang paling dikenal adalah protes *topless* (tanpa busana di bagian atas), yang bertujuan untuk menarik perhatian media dan menantang persepsi masyarakat tentang tubuh perempuan yang sering dijadikan objek seksual. Slogan kontroversial seperti "*Ukraine is Not a Brothel*" menjadi alat utama dalam kampanye mereka untuk mengkritik industri seks yang berkembang di Ukraina.

2.1.1. Ideologi Sextremisme

Dalam konteks pergerakan perempuan Femen mengklaim diri menggunakan seksualitas sebagai senjata perlawanan (Shevchenko 2013). Hal ini kemudian dilabeli sebagai ideologi '*sextremism*'. Pemahaman mengenai *value* ini kemudian diartikulasikan sebagai gerakan protes dengan menggunakan tubuh sebagai alat penyampaian pesan politik. Ideologi sextremisme yang diartikulasikan oleh Femen menentang struktur sosial patriarki yang represif terhadap identitas perempuan dan yang kedua adalah artikulasinya mengenai

keadaan yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Kedua nilai tersebut yang menjadi pedoman dalam setiap pergerakan Femen.

Shevchenko (2013) menguraikan konsep ideologi sextremisme dengan menggambarkan tiga bentuk penindasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh struktur sosial patriarki. Penindasan tersebut hadir dalam bentuk kepemimpinan otoriter, dominasi sistem keagamaan, dan eksploitasi melalui industri seks. Berangkat dari realitas ini, ideologi sextremisme menjadi landasan bagi Femen dalam membangun identitasnya sebagai gerakan yang bersifat demokratis, menolak otoritas keagamaan, dan berfokus pada kebebasan serta kedaulatan atas seksualitas perempuan.

Femen mengartikulasikan bahwasanya pergerakan mereka ialah oposisi terhadap pemerintahan yang otoriter. Hal tersebut dibuktikan oleh pernyataan Shevchenko (2013) *'First, Dictatorship, as a tool for enslaving women. For this reason we are a democratic movement.'* Otoriter yang dimaksud adalah terkait dengan ideologi dasar sextremisme yang menganggap seksualitas perempuan yang dimanifestasi dalam kebebasan menggunakan tubuhnya mendapat represi dari pemerintah.

Kemudian perihal manifesto kedua yaitu artikulasi pemahaman struktur patriarki oleh Femen adalah terkait dengan persepsi opresi dari institusi dan nilai-nilai keagamaan terhadap kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Mengutip Inna Shevchenko, *"The second part of the system consists of religion and the church, which have overseen the spiritual enslavement of women. For this reason Femen is an atheistic group motivated by secularism and humanism."*

Pernyataan tersebut didukung oleh kejadian empiris yang dilakukan oleh Femen yaitu aksi protes Femen ketika memotong dan merobohkan salib raksasa di pusat kota Kiev, Ukraina sebagai simbol perlawanan terhadap penangkapan Pussy Riot band di Rusia.

Poin ketiga yang mendasari Femen mendefinisikan patriarki adalah adanya industri seks yang terdiri dari perempuan sebagai komoditas utama. Gerakan ini menjadikan sasaran tidak hanya industri prostitusi, melainkan juga setiap model industri yang memposisikan tubuh perempuan sebagai objek seksual. Tujuan dari Femen terkait dengan industri seks adalah untuk menggunakan tubuh perempuan yang selama ini menjadi komoditas seks, untuk menyampaikan pesan politik yang mereka bawa dalam hal ini pesan-pesan radikal terhadap pembebasan perempuan.

2.1.2. Metode dan Aksi Femen

Gerakan Femen sendiri melabeli gerakan mereka dalam memperjuangkan kesetaraan gender menggunakan feminisme, atau prajurit feminisme. Inna Shevchenko mengatakan', "*You are not a model, you are not gonna show how beauty you are, you are a soldier*" Pernyataan tersebut dapat diartikulasikan dengan Gerakan Femen menjalankan kepercayaan mereka sebagai prajurit feminisme. Pertama adalah, melihat cara protes yang mereka lakukan yaitu dengan *facing the enemy face to face* (Shevchenko 2013). Selanjutnya adalah menggunakan tubuh mereka sebagai media untuk protes dan persepsi terhadap opresi perempuan sebagai perang antar gender. Hal-hal tersebut ditujukan guna menyebarkan ide-ide Gerakan Femen kepada sasaran yang diinginkan.

Gerakan Femen sendiri melakukan aksi protes yang cenderung tidak memperhatikan etika, terutama etika untuk menyuarakan pendapat di muka umum. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan berada sedekat mungkin dengan target protes dan melayangkan poin utama terhadapnya seperti “*fuck off, dictator!*”, “*I’m not your sex toy!*”, atau “*religion is slavery!*” (Shevchenko 2015). Cara tersebut dilakukan contohnya ketika melakukan protes terhadap beberapa pemimpin dunia, seperti Presiden Rusia Vladimir Putin, Kanselir Jerman Angela Merkel, dan Pemimpin Katolik Paus Fransiskus.

Strategi utama yang dilakukan oleh Gerakan Femen adalah dengan melakukan protes *topless* atau dengan telanjang dada. Menurut Theresa O’Keefe (2014) *topless* yang dilakukan oleh Gerakan Femen merupakan salah satu bentuk protes kontemporer gerakan perempuan saat ini. *Topless* merupakan bentuk protes yang tergolong baru dan bertentangan dengan beberapa aturan moral di masyarakat. *Topless* dilambangkan sebagai kekuatan Gerakan Femen, bahwasanya *topless* memiliki kekuatan sebagai media untuk menarik perhatian publik sekaligus sebagai media protes/kritik yang ditujukan terhadap pihak-pihak yang menindas hak-hak perempuan. Cara protes yang dapat dikatakan kontroversial ini yang menjadikan isu-isu yang awalnya kecil menjadi isu yang besar dan umum yang dibicarakan di khalayak masyarakat.

Berdasarkan aksi dan metode yang dilakukan oleh Gerakan Femen mereka tidak hanya membatasi objek protes mereka terhadap pemerintahan maupun negara. Pada agenda Uni Eropa contohnya mereka melakukan protes ketika, Paus Fransiskus mengunjungi kota Strasbourg di Alsatian untuk memberikan pidato

pertamanya kepada Parlemen Uni Eropa, sebelum pidatonya, seorang demonstran Gerakan Femen naik ke altar di katedral Strasbourg sambil memamerkan tubuhnya yang telanjang dan mengibarkan bendera Uni Eropa, dimana kata-kata "Eropa Anti-sekuler," tertulis di dadanya, dan "Paus Bukan Politisi" di punggungnya. Menurut undang-undang setempat, aktivis Femen dapat menghadapi tuduhan penodaan agama, kejahatan yang dapat dihukum hingga tiga tahun penjara, sesuai hukum di wilayah Alsace di Perancis yang memiliki pengecualian khusus terhadap hukum nasional Perancis tentang pemisahan antara gereja dan negara (Frederick, 2014). Selain itu, Gerakan Femen juga menggelar demonstrasi menentang Miss Ukraina pada 2009, menyatakan bahwa kontes kecantikan mengeksploitasi perempuan dan memperkuat standar patriarkal. Aktivis memblokir lokasi acara dengan tubuh bertuliskan "*Stop pimping!*" dan "*Beauty is a trap,*" menunjukkan upaya Femen untuk membongkar komodifikasi perempuan dalam budaya pop (Shevchenko & Umland, 2012).

Salah satu aksi mereka terjadi pada November 2011, ketika aktivis Gerakan Femen Alexandra Shevchenko, melakukan demonstrasi di Saint Peter's Square, Takhta Suci, setelah khotbah Minggu Paus Benediktus XVI. Shevchenko mengangkat spanduk bertuliskan "Kebebasan bagi perempuan" sebelum akhirnya ditangkap oleh polisi Italia (Sorokowski, 2021). Aksi ini mencerminkan strategi provokatif Gerakan Femen yang menargetkan institusi agama, yang mereka anggap sebagai sumber pembatasan kebebasan perempuan. Pada April 2012, Gerakan Femen kembali menggelar aksi protes terhadap kebijakan anti-aborsi di Ukraina. Lima aktivis Gerakan Femen menaiki menara lonceng Katedral Saint

Sophia di Kiev dan membunyikan lonceng sebagai simbol peringatan atas ancaman terhadap hak reproduksi perempuan. Protes ini menggarisbawahi perjuangan Gerakan Femen dalam menentang kontrol negara terhadap tubuh perempuan, yang sejalan dengan teori feminisme gelombang kedua yang berfokus pada hak-hak tubuh dan otonomi perempuan (Freedman, 2014).

Selain melawan kebijakan negara, Gerakan Femen juga menargetkan tokoh agama dalam protes mereka. Pada Juli 2012, Yana Zhdanova menyerang Patriark Kirill I dari Moskow saat kunjungannya ke Ukraina. Dengan kata "Bunuh Kirill" tertulis di punggungnya, Zhdanova berteriak "Keluar!" sebagai bentuk perlawanan terhadap pengaruh Gereja Ortodoks Rusia di Ukraina. Aksi ini menunjukkan perlawanan terhadap keterlibatan agama dalam politik dan peran dominan Gereja dalam menekan hak-hak perempuan (González, 2016).

Selain isu agama dan seksualitas, *Femen* juga menyoroti kekerasan seksual dan kegagalan sistem hukum. Pada 2013, mereka menggelar aksi di depan kantor kejaksaan Kyiv untuk menuntut keadilan bagi korban kekerasan seksual. Dengan membawa poster "*Stop Rape Culture!*" para aktivis memperlihatkan bagaimana protes tubuh tidak semata performatif, tetapi juga menuntut perubahan konkret dalam sistem hukum yang patriarkal dan tidak berpihak pada korban (Kulpa & Mizielinska, 2011).

Salah satu aksi paling kontroversial Gerakan Femen terjadi pada Agustus 2012, ketika mereka menebang kayu salib besar di Kiev sebagai bentuk solidaritas terhadap Pussy Riot, sebuah kelompok feminis Rusia yang dipenjara karena aksi protes anti-Putin mereka. Aksi ini memicu reaksi keras, dengan pemerintah

Ukraina menuduh mereka melakukan hooliganisme berdasarkan KUHP Ukraina. Gerakan Femen menuduh pemerintah melakukan tindakan represif terhadap aktivis mereka setelah kejadian tersebut (McDonald, 2018). Selain itu, pada April 2013, Gerakan Femen juga membakar bendera Salafi di depan Masjid Paris sebagai dukungan terhadap Amina Tyler, seorang aktivis feminis Tunisia yang dipersekusi karena aksinya. Berbagai aksi ini menegaskan bahwa Gerakan Femen menggunakan protes radikal untuk menyoroti ketidakadilan gender global, meskipun metode mereka kerap memicu kontroversi dan perdebatan tentang efektivitas serta etika perjuangan feminis radikal.

2.2. Kebijakan Ukraina dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender

Ukraina telah mengadopsi berbagai kebijakan dan inisiatif untuk mewujudkan kesetaraan gender, baik melalui reformasi hukum, program nasional, maupun kerja sama dengan organisasi internasional. Upaya ini semakin diperkuat setelah Ukraina berkomitmen untuk memenuhi standar internasional, seperti yang tercantum dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) tahun 1981 dan *United Nations Security Council Resolution* (UNSCR) 1325 tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan (United Nations, 2000). Menurut laporan *Global Gender Gap Report* yang diterbitkan oleh *World Economic Forum* (2015), Ukraina menempati peringkat ke-67 dari 142 negara dalam hal kesetaraan gender.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan Ukraina adalah perumusan dan implementasi kebijakan hukum yang mendukung kesetaraan gender. Pemerintah Ukraina telah mengesahkan *Law on Ensuring Equal Rights and Opportunities for*

Women and Men tahun 2005, yang memberikan dasar hukum untuk menghapus diskriminasi gender di berbagai sektor, termasuk politik, ekonomi, dan sosial (Verkhovna Rada of Ukraine, 2005). Selain itu, reformasi dalam *Labour Code of Ukraine* bertujuan untuk memastikan kesetaraan upah dan kesempatan kerja bagi perempuan (International Labour Organization, 2020). Pada tahun 2017, Ukraina juga mengadopsi *Law on Prevention and Combating Domestic Violence*, yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender dan memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku (Council of Europe, 2017).

Di sektor politik, Ukraina telah mengadopsi kebijakan kuota gender untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pemerintahan. Menurut laporan *Organization for Security and Co-operation in Europe* (OSCE, 2019), perubahan dalam undang-undang pemilu tahun 2019 menetapkan bahwa setidaknya 30% dari daftar kandidat partai politik harus diisi oleh perempuan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan representasi perempuan dalam parlemen dan jabatan publik lainnya. Selain itu, perempuan Ukraina semakin banyak terlibat dalam sektor pertahanan, terutama setelah pencabutan larangan terhadap perempuan dalam jabatan tempur pada tahun 2018 (Ministry of Defence of Ukraine, 2018). Langkah ini memungkinkan lebih banyak perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam keamanan nasional, terutama dalam konteks konflik yang sedang berlangsung.

Dalam tingkat internasional, Ukraina terus menjalin kerja sama dengan organisasi seperti *UN Women*, *European Union*, dan *United Nations Development Programme* (UNDP) untuk memperkuat kebijakan kesetaraan gender.

Program-program yang didukung oleh organisasi internasional ini mencakup bantuan bagi perempuan pengungsi akibat konflik (UNHCR, 2022), pemberdayaan ekonomi perempuan (World Bank, 2021), serta pelatihan kewirausahaan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mereka. Selain itu, Ukraina juga mengadopsi *Istanbul Convention* pada tahun 2022, yang berfokus pada pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan (Council of Europe, 2022). Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, tantangan masih ada dalam implementasi yang efektif, terutama di daerah konflik dan pedesaan di mana akses terhadap sumber daya dan layanan perlindungan masih terbatas. Namun, dengan adanya dukungan dari komunitas internasional dan masyarakat sipil, Ukraina terus berupaya mempercepat realisasi kesetaraan gender secara menyeluruh.

2.3. *National Action Plan 1325*

National Action Plan (NAP) adalah rencana aksi nasional yang dibuat oleh suatu negara untuk mengimplementasikan kebijakan tertentu, terutama yang berkaitan dengan kesepakatan atau perjanjian internasional. Dalam konteks kesetaraan gender dan perlindungan perempuan, NAP sering kali dikaitkan dengan implementasi United Nations Security Council Resolution (UNSCR) 1325 tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan (Women, Peace, and Security – WPS) (United Nations Security Council, 2000).

NAP dirancang untuk mengidentifikasi langkah-langkah spesifik yang harus diambil oleh pemerintah dan lembaga terkait guna mencapai tujuan tertentu dalam berbagai bidang, seperti kesetaraan gender, perlindungan perempuan dalam

konflik bersenjata, pemberdayaan ekonomi, serta pencegahan dan penanggulangan kekerasan berbasis gender (UN Women, 2020). Setiap NAP biasanya mencakup tujuan strategis, indikator keberhasilan, serta alokasi sumber daya dan anggaran untuk memastikan implementasinya berjalan efektif. Dalam sistem multilateral, Negara Anggota memegang tanggung jawab utama dalam mencapai kesetaraan gender dan pemenuhan hak asasi manusia (Office of the Special Representative on Sexual Violence in Conflict, 2019).

Dalam pernyataan presidensial pada tahun 2004, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mendorong pelaksanaan Resolusi 1325 di tingkat nasional, yang merupakan resolusi penting dalam agenda Women, Peace, and Security (WPS), termasuk melalui Rencana Aksi Nasional (NAP) untuk mengimplementasikan empat pilar resolusi tersebut: partisipasi, pencegahan, perlindungan, serta bantuan dan pemulihan (UN Security Council, 2004). DK PBB juga mendorong Negara Anggota untuk bekerja sama dengan masyarakat sipil, khususnya dengan jaringan dan organisasi perempuan lokal, dalam pelaksanaan Resolusi 1325.

Rencana Aksi Nasional pertama dikembangkan pada tahun 2005, dan sejak saat itu lebih dari 100 negara telah menyusun NAP untuk mengimplementasikan Resolusi DK PBB 1325 serta resolusi terkait mengenai perempuan, perdamaian, dan keamanan, termasuk Resolusi DK PBB 1820 yang menekankan perlunya tindakan melawan kekerasan seksual dalam konflik (UN Security Council, 2008).

Selama 19 tahun terakhir dalam pengembangan dan adaptasi Rencana Aksi Nasional (NAP), implementasi agenda Women, Peace, and Security (WPS) juga telah berkembang di tingkat lain, termasuk tingkat regional, organisasi, dan lokal. Sejumlah Regional Action Plans (RAP) telah diterapkan, seperti yang dilakukan oleh African Union dan European Union (African Union, 2018; European External Action Service, 2022). Upaya koordinasi regional juga mencakup Asia-Pacific Regional Symposium on National Action Plans on Women, Peace, and Security, di mana Negara Anggota bersama perwakilan masyarakat sipil berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam implementasi Resolusi DK PBB 1325 (UN Women, 2021)

2.3.1. *National Action Plan* 1325 Ukraina

Ukraina mengadopsi Rencana Aksi Nasional (NAP) pertama untuk implementasi United Nations Security Council Resolution (UNSCR) 1325 tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan (Women, Peace, and Security – WPS) pada periode 2016-2020 (Cabinet of Ministers of Ukraine, 2016). NAP ini merupakan bagian dari komitmen Ukraina untuk meningkatkan perlindungan perempuan dalam situasi konflik serta memastikan keterlibatan mereka dalam proses perdamaian dan keamanan nasional. Pada tahun 2020, Ukraina menerbitkan NAP kedua untuk periode 2020-2025 (Government of Ukraine, 2020). Namun, pada akhir tahun 2022, di tengah invasi besar-besaran Rusia yang masih berlangsung, Pemerintah Ukraina meluncurkan inisiatif untuk merevisi NAP guna mencerminkan implementasi agenda Women, Peace, and Security (WPS) dalam praktiknya (UN Women Ukraine, 2022). Revisi ini bertujuan untuk

belajar dari inisiatif pemerintah sebelumnya serta kontribusi masyarakat sipil dalam memperbaiki dan mengimplementasikan rencana tersebut secara lebih efektif dalam konteks konflik yang terus berkembang.

Ukraina mulai mengembangkan NAP 1325 2016-2020 sebagai respons terhadap konflik bersenjata yang dimulai pada tahun 2014, terutama di wilayah Donbas, setelah aneksasi Krimea oleh Rusia (OSCE, 2015). Perempuan di Ukraina terkena dampak besar akibat konflik ini, termasuk menjadi pengungsi internal, mengalami kekerasan berbasis gender, dan menghadapi diskriminasi dalam partisipasi di sektor keamanan (United Nations Population Fund (UNFPA), 2019). Salah satu tujuan utama NAP ini adalah mengintegrasikan perspektif gender dalam kebijakan keamanan nasional, termasuk dengan meningkatkan jumlah perempuan di angkatan bersenjata, kepolisian, dan lembaga pertahanan (Ministry of Defence of Ukraine, 2017). Selain itu, NAP ini juga menekankan pentingnya pencegahan kekerasan berbasis gender di daerah konflik serta penguatan mekanisme hukum dan sosial untuk mendukung perempuan yang terdampak perang. Program rehabilitasi bagi perempuan korban konflik dan penyediaan layanan psikososial bagi pengungsi internal juga menjadi bagian penting dalam implementasi NAP tersebut (UNHCR Ukraine, 2021).

Rencana Aksi Nasional (NAP) Ukraina 1325 untuk periode 2020-2025 disusun sebagai kelanjutan dari kebijakan sebelumnya, dengan fokus yang lebih kuat pada pengarusutamaan gender dalam kebijakan pertahanan dan keamanan, terutama dalam konteks konflik yang masih berlangsung. NAP ini memiliki lima tujuan strategis utama yang mencerminkan pendekatan komprehensif terhadap isu

perempuan, perdamaian, dan keamanan di Ukraina. NAP ini menekankan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di semua tingkatan dalam pencegahan konflik, penyelesaian konflik, dan pemulihan pasca-konflik, terutama di sektor keamanan dan pertahanan (United Nations Security Council, 2000). Selain itu, terdapat komitmen untuk membangun sistem yang peka gender dalam menghadapi tantangan keamanan, sehingga dapat mendeteksi, mencegah, dan merespons ancaman terhadap perempuan dalam konflik (UN Women, 2021). Untuk pemulihan pasca-konflik, NAP ini menitikberatkan pada penerapan keadilan transisional yang berbasis kesetaraan hak dan kesempatan bagi semua gender (European Institute for Gender Equality, 2019). Ukraina juga berkomitmen untuk melindungi perempuan dari kekerasan berbasis gender dan kekerasan seksual, baik dalam situasi konflik maupun di masa damai, dengan meningkatkan mekanisme hukum dan perlindungan sosial (Council of Europe, 2022). Selain itu, guna memastikan implementasi yang efektif, diperlukan penguatan kapasitas institusional aktor-aktor yang terlibat dalam NAP, dengan meningkatkan pelatihan bagi pejabat pemerintah dan aparat keamanan serta memperkuat kerja sama dengan organisasi internasional dan masyarakat sipil (UNDP, 2020).